

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melakukan investasi untuk mendapatkan manfaat di bidang ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara termasuk mengelola investasi baik yang ditetapkan dalam APBN maupun APBD. APBD merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengelola dan melaksanakan anggarannya sendiri karena terdapat otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat dapat memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola dan melaksanakan APBD. Hal ini dapat menjadi peluang daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Upaya untuk menyejahterakan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai entitas pelayanan publik. BUMD dibentuk sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (Budhisulistyawati et al., 2015).

Salah satu kewenangan daerah untuk berinvestasi adalah dengan penyertaan modal. Penyertaan modal termasuk jenis investasi langsung yang dilakukan pemerintah dalam bentuk saham atau hak kepemilikan. Investasi dilakukan untuk memperoleh dividen dan mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu objek investasi pemerintah daerah adalah penyertaan modal Pemerintah daerah (Pemda) kepada BUMD. Sumber dana penyertaan modal daerah dapat berasal dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman. Penyertaan modal daerah kepada BUMD dimaksudkan untuk menambah dan memperkuat struktur modal sehingga tujuan BUMD dapat tercapai.

Menurut Perda DIY No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan PT Asuransi Bangun Askrida, penyertaan modal daerah adalah penempatan dana atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang maupun barang dengan tujuan meningkatkan ekonomi daerah, menambah pendapatan daerah, dan menciptakan lapangan kerja. Penyertaan modal dilaksanakan dengan prinsip ekonomi perusahaan. Terdapat beberapa BUMD di DIY yang mendapatkan penyertaan modal pemerintah daerah, salah satunya adalah PT Bank BPD DIY, yang menerima penyertaan modal terbanyak dibandingkan BUMD lain. PT Bank BPD DIY mengalami perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan Perda ini, perubahan badan hukum menjadi PT bertujuan

meningkatkan peran perbankan dalam rangka pertumbuhan perekonomian daerah, memperluas ekspansi penyediaan jasa pelayanan perbankan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebagai perusahaan perseroan terbatas, komposisi modal PT Bank BPD DIY paling banyak dimiliki oleh Pemerintah DIY sebesar 51% dan sisanya dimiliki oleh kabupaten/kota di DIY (PT Bank BPD DIY, 2020). Modal dasar bank sejumlah Rp4 triliun sehingga alokasi penyertaan modal yang harus dipenuhi adalah 51% dari modal dasar yaitu Rp2,04 triliun. Penyertaan modal sampai 2016 telah disetorkan sebesar Rp510 miliar dan kewajiban penambahan penyertaan modal 2018–2025 dengan total Rp1,53 triliun. Penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal setiap tahun anggaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah DIY No. 14 Tahun 2018.

Selain penyertaan modal, PT Bank BPD DIY mendapatkan penempatan dana Rp1 triliun dalam program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada UMKM dengan suku bunga rendah. PT Bank BPD DIY tahun 2020 berada dalam level likuiditas yang baik dan sehat meskipun sedang berada di masa pandemi. Dalam Laporan Tahunan 2021, PT Bank BPD DIY memperoleh laba sebesar Rp346 miliar. Laba kemudian dibagikan kepada para pemegang saham, terutama Pemda DIY. Selain itu, jumlah kredit mencapai Rp8,15 triliun, meningkat 5% dibandingkan tahun 2020. Hal ini dapat menunjukkan tingkat penyerapan kredit meningkat. Per Desember 2021, kredit UMKM DIY meningkat 17,80%. Pertumbuhan ini menunjukkan tanda

positif bahwa tingkat penyaluran kredit UMKM yang disediakan PT Bank BPD DIY meningkat sehingga dapat memberikan laba kepada bank.

PT Bank BPD DIY mempunyai akses terbanyak dalam memberikan jasa layanannya kepada UMKM dan berhubungan langsung dengan permodalan usaha masyarakat. Berdasarkan Laporan Tahunan 2019, PT Bank BPD DIY menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar Rp2.064,67 miliar atau 86,24% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Selain itu, tingkat kredit macet termasuk baik sebesar 3%. Batas toleransi tingkat kredit macet yang ditetapkan Bank Indonesia adalah 5% (Claudya et al., 2016). Distribusi kredit UMKM di DIY didominasi oleh sektor perdagangan. Berdasarkan data dari laporan perekonomian DIY triwulan IV 2021, penyaluran kredit sektor perdagangan mencapai 46,9% dari total penyaluran kredit UMKM tahun 2021 (Bank Indonesia, 2022). Presentase ini terbesar daripada usaha di sektor lainnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY dalam jumlah yang signifikan, sehingga dapat menjadi penopang utama perekonomian di DIY. Data BPS menyebutkan bahwa sampai November 2021, jumlah UMKM DIY berdasarkan skala usaha (skala mikro, kecil, dan menengah) adalah 302.398,00 unit, jumlah tenaga kerja DIY tahun 2020 mencapai 528.479 orang dengan omzetnya mencapai Rp236.974.960,00 per tahun. Jumlah ini mengalami pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data-data tersebut, UMKM diketahui dapat menyerap tenaga kerja dan kontribusi terhadap perekonomian daerah dengan jumlah signifikan.

Pemerintah daerah DIY mendukung UMKM melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY (Diskop UKM). Salah satu dukungan Pemda DIY terhadap UMKM adalah membangun SiBakul Jogja atau Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Pemerintah DIY (Pitaloka, 2021). Sistem ini berbentuk laman *website*. Sistem ini dapat membantu dengan menyediakan informasi promosi, layanan data, aduan dan konsultasi, agenda pelatihan, serta panduan untuk belanja, menjadi mitra, atau menjadi operator sistem. Program Diskop UKM untuk mendukung *e-commerce* dengan mengadakan program gratis ongkir dan pembinaan literasi keuangan. Selain itu, dukungan Pemda DIY kepada UMKM dilakukan melalui bank penyalur seperti PT Bank BPD DIY dengan memberikan penyertaan modal. Dana dari penyertaan modal ini digunakan perbankan untuk memperluas sistem kredit UMKM.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY, pemerintah daerah tentu mengharapkan *return* dalam bentuk dividen dari investasi yang dilakukan. Dividen dari hasil penyertaan modal BUMD inilah yang diharapkan pemerintah daerah. Dividen ini dapat menjadi tambahan pendapatan asli daerah (PAD). Komponen PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKD), dan lain-lain PAD yang sah. Dividen ini merupakan komponen HPKD. PAD menjadi hal utama dalam pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah artinya kemampuan daerah membiayai kegiatan pemerintahannya. Kemandirian daerah ini dapat dilihat dari besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan lainnya seperti pendapatan transfer (Halim, 2007). Dengan demikian, pendapatan

daerah merupakan indikator kemandirian daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin rendah (Nurhasanah & Maria, 2017). Daerah yang mandiri dan memiliki pendapatan daerah yang lebih tinggi dari belanja/pengeluarannya, akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk memajukan daerahnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan dilakukan tinjauan atas pelaksanaan penyertaan modal Pemda DIY kepada PT Bank BPD DIY. Penelitian ini juga akan meninjau pelaksanaan penyaluran pembiayaan kepada UMKM sebagai fokus PT Bank BPD DIY dalam pelayanan kepada masyarakat, beserta faktor-faktor yang membantu keberhasilan penyaluran pembiayaan tersebut. Hasil tinjauan akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank BPD DIY dalam Rangka Penguatan UMKM di Yogyakarta”. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta menjadi dasar penelitian selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY dalam rangka penguatan UMKM DIY?
2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran pembiayaan PT Bank BPD DIY kepada UMKM DIY?
3. Apa saja faktor-faktor keberhasilan pembiayaan UMKM pada PT Bank BPD DIY?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Mengetahui pelaksanaan penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY dalam rangka penguatan UMKM DIY.
2. Mengetahui pelaksanaan penyaluran pembiayaan PT Bank BPD DIY kepada UMKM DIY.
3. Mengetahui faktor-faktor keberhasilan pembiayaan UMKM pada PT Bank BPD DIY.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini memberikan batasan dalam karya tulis ini agar lebih fokus dan spesifik dalam pembahasan. Ruang lingkup dalam penulisan KTTA ini mencakup pelaksanaan penyertaan modal Pemda DIY kepada PT Bank BPD DIY. Penyaluran modal ini dalam rangka memajukan UMKM dan meningkatkan pendapatan daerah DIY. Penelitian ini meninjau pelaksanaan penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY dan penyaluran pembiayaan PT Bank BPD DIY kepada UMKM selama kurun waktu 2017–2021 beserta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penyaluran pembiayaan tersebut. Tahun 2017 menjadi tahun transisi perubahan modal dasar PT Bank BPD DIY. Tahun 2017 tidak ada penambahan penyertaan modal dari Pemda DIY, namun masih membawa posisi modal sebesar Rp510 miliar dari penyertaan modal 2013–2016, sehingga tetap mendapatkan dividen. Kemudian dikeluarkan Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018 dengan penyertaan modal menjadi Rp2,04 triliun yang akan dipenuhi sampai 2025. Pada tahun 2018 dan 2019 adalah tahun sebelum adanya pandemi Covid-

19, yang memengaruhi jumlah anggaran. Penelitian ini mengambil 5 tahun pelaksanaan penyertaan modal untuk mengetahui tren pelaksanaan penyertaan modal yang dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah akibat pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Menambah pengetahuan peneliti mengenai pelaksanaan penyertaan modal Pemda DIY kepada PT Bank BPD DIY serta pelaksanaan penyaluran pembiayaan/kredit kepada UMKM.
2. Menjadi informasi tambahan bagi objek penelitian KTTA dalam rangka evaluasi mengenai pelaksanaan penyertaan modal dan penyaluran pembiayaan kepada UMKM.
3. Menjadi informasi tambahan bagi masyarakat umum mengenai pelaksanaan penyertaan modal, penyaluran pembiayaan kepada UMKM, serta faktor keberhasilan penyaluran pembiayaan kepada UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Penulisan karya tulis tugas akhir terdiri dari empat bab. Tiap bab memiliki subbab-subbab yang disusun dengan urutan pembahasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I akan diuraikan gambaran umum penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II akan dijelaskan tentang landasan teori tentang pengelolaan investasi pemerintah daerah, konsep BUMD, konsep penyertaan modal pemerintah daerah berupa pelaksanaan dan penyaluran penyertaan modal, serta teori tentang UMKM terutama di DIY.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III berisi penjelasan mengenai metode pengumpulan data dan metode analisis data, gambaran umum objek penelitian, serta pembahasan hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dari literatur dan studi lapangan berupa wawancara kemudian data akan dianalisis dengan *software* pengolahan data ATLAS.ti. Gambaran umum objek penulisan akan diuraikan tentang profil umum, sejarah singkat, struktur organisasi, visi, misi, budaya, PT Bank BPD DIY sebagai BUMD. Pembahasan hasil akan dijelaskan tentang pelaksanaan dan penyaluran penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY sesuai fenomena yang terjadi.

BAB IV KESIMPULAN

Pada Bab IV diuraikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengguna maupun pada perkembangan ilmu pengetahuan secara umum.